

Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural di Institut Agama Islam Negeri Kendari

Mahrudin

Institut Agama Islam Negeri Kendari
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kendari
e-mail: udinmahru@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membangun konsep falsafah tiga etnis besar masyarakat Sulawesi Tenggara dalam pembelajaran *civic education*. Meneropong pendidikan multikultural dalam ruang mikro baik pergaulan, sikap maupun perilaku belajar mahasiswa IAIN Kendari yang berasal dari tiga etnis besar tersebut. Falsafah lokal dalam pembelajaran ini diyakini dapat menanamkan nilai-nilai multikultural kewarganegaraan di Indonesia. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan etnografi, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga falsafah tersebut dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam kehidupan multikultural di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda masyarakat Sulawesi Tenggara. Hal ini karena falsafah ini mengajarkan pentingnya nilai-nilai moral dalam bermasyarakat, Falsafah Buton yaitu *pomae-maeka*, *popia-piara*, *pomaa-maasiaka*, dan *poangka-angkataka*. Falsafah Muna yaitu *Dapoangka-angkatau*, *dapopia-piara*, *dapomasi-masigho*, *dapoadha-adhati* dan Falsafah Tolaki yaitu *Medulu mbenao*, *Medulu mbonaa*, *Medulu mboehe*. Penerapan ketiga falsafah ini dalam kehidupan bermasyarakat dapat mempengaruhi perilaku generasi muda untuk tidak melakukan tindak kekerasan, merampas hak orang lain, penggunaan obat-obat terlarang, dan terorisme. Implementasi lain dari hal tersebut adalah tetap terjaganya kehidupan multikultural di Sulawesi Tenggara, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Propinsi Sulawesi Tenggara oleh UNDP sebagai propinsi yang aman dan nyaman dari konflik walupun propinsi ini bertetangga dengan daerah yang berkonflik seperti Poso dan Ambon. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa falsafah ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia.

Kata Kunci: Falsafah, Buton, Muna, Tolaki, Pendidikan, multicultural, Kewarganegaraan

Abstract

This study aimed to establish the concept of the philosophy of the three major ethnic communities of Southeast Sulawesi in teaching civic education towards multicultural education. Local philosophy in this study is believed to instill the values of multicultural citizenship in Indonesia. By using the descriptive method of qualitative and ethnographic approach, the results showed that all three philosophies can provide a significant contribution to multicultural life in society, especially among the younger generation of the community of Southeast Sulawesi. It is because of this philosophy teaches the importance of moral values in society, namely philosophy Buton *pomae-maeka*, *popia-piara*, *pomaa-maasiaka*, and *poangka-angkataka*. Muna philosophy that *Dapoangka-angkatau*, *dapopia-piara*, *dapomasi-masigho*, *dapoadha-adhati* and Philosophy Tolaki *Medulu mbenao*, *Medulu mbonaa*, *Medulu mboehe*. The third application of this philosophy in public life can affect the behavior of the younger generation not to commit acts of violence, depriving others, the use of drugs, and terrorism, and more importantly remained subdued multicultural life in Southeast Sulawesi, this is evidenced by the enactment of Sulawesi southeast by UNDP as a province that is safe and comfortable from the conflict even though this province neighboring conflict areas like Poso and Ambon. Therefore, it can be said that this philosophy can contribute to the development of multicultural education in Indonesia.

Key Words: Philosophy, Buton, Muna, Tolaki, Education, multicultural, Citizenship.

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم فلسفة المجتمعات العرقية الثلاثة الرئيسية في جنوب شرق سولاويزي في تدريس التربية المدنية نحو التعليم متعدد الثقافات. ويعتقد الفلسفة المحلية في هذه الدراسة إلى غرس قيم المواطنة متعددة الثقافات في إندونيسيا. باستخدام المنهج الوصفي والمنهج النوعي الإثنوغرافية، وأظهرت نتائج الدراسة أن جميع الفلسفات الثلاثة يمكن أن توفر مساهمة كبيرة في حياة مجتمع متعدد الثقافات، وخاصة بين الشباب من جنوب سولاويزي. وبسبب هذه الفلسفة يعلم أهمية القيم الأخلاقية في المجتمع، وهي فلسفة بوتون *pomae-maeka* ، *popia* فوستر ، *pomaa-maasiaka* ، و- *poangka-angkataka*. مونا الفلسفة هي *Dapoangka-angkatau* ، *dapopia* فوستر ،

Medulu وهي Tolaki والفلسفة dapoadha-adhati ،dapomasi-masigho Medulu mboeche. ، Medulu mbonaa،mbenao الاجتماعية يمكن أن تؤثر على سلوك الشباب بعدم ارتكاب أعمال العنف، وحرمان حقوق الآخرين، واستخدام المخدرات، والإرهاب، والأهم من ذلك ظلت الحياة مهزوما متعددة الثقافات في جنوب شرق سولاويزي، وهذا ما يتضح من سن سولاويزي الجنوب الشرقي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كمقاطعة التي هي آمنة ومريحة من محافظة الرغم من أن هذا يتعارض مع مناطق الصراع المجاورة مثل بوسو وأمبون. وبالتالي، فإنه يمكن القول إن هذه الفلسفة يمكن أن تسهم في تطوير التعليم متعدد الثقافات في إندونيسيا. المواطنة الثقافات، متعدد التعليم، Tolaki، منى، بوتون، الفلسفة،: البحث كلمات

Pendahuluan

Masyarakat majemuk terdiri atas dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan namun tanpa membaaur, dalam satu unit masyarakat. Indonesia sebagai negara besar, berpotensi besar, juga menyimpan tantangan besar untuk mewujudkan kesatuan wilayah, kesatuan politik, dan kesatuan budaya. Oleh karena itu, sejak awal berdirinya Indonesia mencanangkan semangat *bhinneka tunggal ika* yang mengakui adanya kesamaan dan kesejajaran antar elemen atau tatanan sosial yang membaaur dalam suatu unit masyarakat Indonesia. *Bhinneka tunggal ika* merupakan semangat pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman kelompok dan pandangan, termasuk kelompok minoritas.

Kesatuan antar elemen tersebut saat ini dikembangkan sampai pada tataran regional, seperti yang tampak pada forum pasar bebas Asia tahun 2015. Pernyataan Friedman (2005) bahwa dunia ini bukan bulat tetapi sebenarnya rata, menyebabkan manusia berkesempatan bermain di dalam *tu playing field* yang sama. Semua itu menjadi tantangan bangsa dalam mempertahankan konsep negara bangsa (*nation-state*). Konstruksi masyarakat multikultural di Asia Tenggara berkaitan dengan dialektika sejarah dan arus migrasi yang terjadi di wilayah Asia. Hal tersebut meninggalkan jejak-jejak peninggalan yang tersebar di negara-negara Asia.¹

¹ Novi Anoegrajekti. 2014. *Dinamika Budaya Indonesia Dalam pusaran Pasar Global*. Yogyakarta: Ombak

Ruang-ruang tersebut mengharuskan bangsa Indonesia semakin menghargai kebhinnekaan, memiliki daya tahan ekonomi, politik, dan budaya untuk menghadapi pasar bebas Asia yang sudah berada di “ambang pintu”. Keberagaman atau kehidupan lingkungan majemuk bersifat alami dan merupakan sumber kekayaan budaya bangsa. Setiap perwujudan mengandung ciri-ciri tertentu yang membedakannya dari perwujudan yang lain. Tidak mungkin satu perwujudan mengandung semua ciri yang ada karena bila hal itu terjadi, dia akan menjadi maha sempurna, padahal yang maha sempurna adalah Tuhan. Perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebenarnya untuk memenuhi kepentingan bersama agar dapat hidup sejahtera.

Dengan dasar atau landasan proklamasi bangsa Indonesia bertekad mengupayakan pencapaian cita-cita nasional, dan tujuan nasional sebagai bagiannya yang telah disepakati bersama, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI yang disyahkan pada 18 Agustus 1945. Oleh karena itu kepada seluruh warga negara perlu dibekali kemampuan bela negara dalam rangka upaya mempertahankan dan mengamankan bangsa dan negara. Kemampuan itu harus secara dini diberikan kepada warga negara yang berhak wajib ikut serta dalam bela negara, yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan keyakinan akan ketangguhan pancasila dan idiologi bangsa dan negara Indonesia.

Bela negara yang dimaksudkan adalah tekad, sikap semangat dan tindakan seluruh warga negara secara teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang harus diberikan kepada peserta didik setingkat perguruan tinggi dalam bentuk mata kuliah “pendidikan kewarganegaraan (civic education)”. Pendidikan kewarganegaraan menitikberatkan kepada kemampuan penalaran ilmiah yang kognitif dan efektif tentang bela negara dalam ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan wajib diberikan disetiap Perguruan Tinggi di Indonesia dan juga wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Indonesia, yang merupakan mata kuliah bela negara, sehingga pendidikan kewarganegaraan adalah mata kuliah umum, sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka memasukan materi tentang konsep falsafah tiga etnis besar Sultra dianggap sangat penting dalam membentuk kepribadian mahasiswa untuk timbul rasa saling menghargai, saling menghormati dan saling menyayangi serta tidak saling memandang remeh suku lain yang berbeda dengan sukunya.

Untuk itu, maka penggunaan konsep falsafah tersebut dianggap perlu dalam konstruksi pembelajaran civic education.

Konsepsi Filsafat

Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari kata Yunani “philosphia” (dari: philein=mencintai, philia=cinta, dan Sophia=kebijaksanaan) yang melahirkan kata inggris “philosophy”, atau kata arab “falsafah”, dan biasanya diterjemahkan dengan “cinta kebijaksanaan”. Kebijaksanaan yang dimaksud adalah melakukan perbuatan atas dorongan kehendak yang baik berdasarkan putusan akal yang benar sesuai dengan rasa kemanusiaan.

Secara terminologis, atau berdasarkan apa yang terkandung dalam istilahnya, kata “filsafat” banyak artinya, semua aliran filsafat mempunyai defenisi sendiri-sendiri. Dalam tulisan ini dikemukakan defenisi filsafat secara umum, yakni : *filsafat adalah pemikiran secara kritik dan sistematik untuk mencari hakikat atau kebenaran sesuatu.*² Defenisi ini secara ontologis, yakni: untuk mencari hakikat sesuatu, dan secara epistemologis, yakni untuk mencari kebenaran sesuatu. Jika filsafat hukum maka sesuatu itu adalah hokum, dan jika filsafat ilmu maka sesuatu itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, dan jika filsafat etnis masyarakat Sultra maka sesuatu itu adalah tentang etnis Sultra, sehingga filsafat etnis Sultra adalah pandangan hidup secara kritik dan sistematik untuk mencari hakikat atau kebenaran serta cinta tanah air dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Konsepsi Kewarganegaraan

Kewarganegaraan berasal dari kata warga negara yang secara singkat berarti sekelompok manusia yang menjadi anggota suatu negara. Dalam pengertian secara umum dinyatakan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya dan mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbale balik terhadap negaranya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya merupakan sesuatu yang niscaya ada. Jadi tidak boleh tidak harus dirumuskan dalam hukum dasar.

Hak dan kewajiban warga negara terhadap negara diatur dalam Undang-Undang dasar 1945, dan berbagai peraturan dibawahnya.

² Noor Ms Bakry. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal.24

Dalam Undang-Undang dasar 1945 memuat tentang "hak asasi manusia", yaitu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap individu warga negara, seperti hak kebebasan beragama, hak berserikat dan berkumpul, hak mengeluarkan pendapat. Dan juga emuat "Kewajiban asasi manusia", yaitu kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia, seperti setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

Kompetensi lulusan pendidikan kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari seorang warga negara dalam berhubungan dengan negara, dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi filsafat pancasila, menerapkan konstitusi Negara dalam kehidupan sehari-hari, serta Geopolitik Indonesia dan Geostrategi Indonesia.

Seperangkat tindakan cerdas yang dimaksudkan adalah tampak pada kemahiran, ketetapan dan keberhasilan dalam bertindak, sedangkan penuh rasa tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditilik dari nilai ilmu pengetahuan dan teknologi serta etika, ataupun kepatutan dengan ajaran agama serta kepatutan dengan nilai-nilai pancasila.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan pendidikan kewarganegaraan perlu dirumuskan terlebih dahulu tentang visi dan misi serta kompetensi berdasarkan keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006. Visi Pendidikan kewarganegaraan diperguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya dan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Misi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab serta

memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Dengan dasar visi dan misi maka tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum adalah memupuk kesadaran bela negara dan berpikir komprehensif integral dikalangan mahasiswa dalam rangka Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi Indonesia, dengan didasari: 1) kecintaan kepada tanah air, 2) kesadaran berbangsa dan bernegara, 3) memupuk rasa persatuan dan kesatuan, 4) keyakinan atas ketangguhan pancasila, 5) rela berkorban demi bangsa dan negara.

Untuk mendasari tujuan tersebut maka Direktur Jendral Pendidikan Tinggi memandang perlu menyempurnakan Kurikulum inti Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Kewiraan yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 151/DIKTI/Kep/2000, menjadi kurikulum inti pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian sebagai keseragaman terakhir tahun 2006, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, tentang ramb-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan Kepribadian di perguruan Tinggi, yang didalamnya mencantumkan juga substansi kajian mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan mampu: Memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya secara berkesinambungan dan konsisten cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukuan UUD 1945.

Tinjauan Historis

Istilah multikultural secara marak digunakan sekitar tahun 1950 di Kanada. Menurut *Longer Oxford Dictionary*, istilah multikultural diambil dari surat kabar yang terbit di Kanada yang mengabarkan sebuah masyarakat Montreal Kanada sebagai masyarakat yang multikultural dan multi bahasa. Sedangkan Istilah pendidikan multikultural secara sederhana adalah pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan bahkan dunia secara keseluruhan. Hal ini sejalan pendapat Paulo Freire yang dikutip oleh Endah Setiorini: “bahwa pendidikan bukan merupakan menara gading, yang menjauhi realitas sosial-budaya melainkan harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang berpendidikan, berbudaya dan mengedepankan

nilai-nilai egalitarian, demokrasi, kebebasan dan persaudaraan.”³

Pendidikan multikultural merupakan respon dari keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok etnis. Pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan. Sedangkan secara luas pendidikan multikultural mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok, baik gender, etnis, ras, budaya, strata sosial dan agama. Pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangan dan kegagalan dan praktek-praktek diskriminatif dalam proses pendidikan. Pendidikan multikultural didefinisikan tentang pendidikan keragaman budaya dalam perubahan demografis dan budaya masyarakat tertentu atau dunia secara keseluruhan. Di Indonesia pendidikan multikultural relatif baru, pendekatan pendidikan multikultural dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen dan multi etnis. Apalagi pada masa era otonomi daerah dimana konsep sentralisasi bergeser ke desentralisasi dalam kebijakan-kebijakan tertentu. Pendidikan multikultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan dengan perkembangan demokrasi yang sedang dijalankan sekaligus sebagai penyeimbang terhadap kebijaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Apabila kebijakan pendidikan multi kultural dilaksanakan dengan sembrono dan tidak hati-hati justru akan menyebabkan kedalam perecahan nasional dan disintegrasi bangsa.⁴

Pentingnya Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural sangat penting khususnya dalam pengajaran ilmu pengetahuan sosial. Pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup untuk menghormati secara tulus, dan toleran dalam keberagaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat majemuk. Dengan diberikannya pendidikan multikultural diharapkan adanya kelenturan mental bangsa dalam menghadapi konflik-konflik yang berbau suku antar golongan ras dan agama (SARA), sehingga persatuan bangsa tidak mudah retak dan terjadi disintegrasi bangsa.

Adapun tujuan pendidikan multikultural adalah:

“Membantu anak didik dalam mengembangkan pemahaman dan

³ Endah Setyorini, 2005. *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: FIP UNY. Hal.2

⁴ Aprelliana Setyowati, 2005. *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: FIP UNY

sikap secara memandai terhadap masyarakat yang beraneka ragam budaya. Anak didik memiliki budaya sendiri yang hakiki, namun tetap memberi andil terhadap kesejahteraan masyarakat. Mengembangkan pendidikan yang wajar, tanpa memandang perbedaan, membantu peserta didik untuk berpartisipasi dalam kultur berbeda. Membantu anak didik dalam memberdayakan potensi yang optimal”.⁵

Oleh karena itu pendidikan multikultural harus memperhatikan beberapa hal antara lain: Pengajaran nilai yang mendukung keberagaman budaya dan keunikan individu. Peningkatan perluasan kualitatif keberadaan budaya etnis dan kerjasama dalam kehidupan sosio ekonomis dan politik, mendukung alternatif pemunculan gaya hidup dan peningkatan pemahaman multikultural, multi bahasa dan multi dialektika. Dalam konteks kehidupan berbangsa yang seras dengan kemajemukan berbagai bidang; suku, ras, golongan, agama, bahasa daerah dan kepentingan, maka pendidikan multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola secara kreatif, sehingga konflik dapat dikelola dengan cerdas. Dengan demikian pendidikan multikultural dapat dijadikan pencerahan dalam kehidupan berbangsa ke masa depan yang lebih baik.

Perkembangan sejarah Indonesia, seras diwarani dengan konflik-konflik sosial dan disertai dengan tindak kekerasan sehingga mengancam kesatuan-persatuan bangsa dan negara. Pengalaman masa lalu sering timbul peperangan antar kerajaan dan setelah kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga sering timbul konflik yang membawa fanatisme kedaerahan. Konflik sosial sering bertendensi politik dan ujung-ujungnya ingin melepaskan diri dari NKRI seperti yang terjadi saat ini di Papua. Oleh karena itu, dengan diberikannya pendidikan multikultural diharapkan konflik sosial yang destruktif dapat diredam atau diatasi sehingga disintegrasi bangsa diharapkan tidak terjadi. Pendidikan Pancasila dan pendidikan Kewarganegaraan yang mempunyai tujuan untuk membentuk warga negara yang baik (*Good Cetezen*) dengan kriteria beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa belum memberi jaminan untuk terwujudnya masyarakat yang demokratis, dengan cara hidup yang multikultural (Kaelan)⁶.

⁵ Setyo Nugroho. 2002. “Mengimplementasikan Pendidikan Multikultural di Sekolah” Jurnal Ilmiah Guru “COPE” No. 02/Tahun VI/Desember 2002. Hal. 27

⁶ Kaelan, M.S., 2003. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma. Hal. 15

Pembahasan

Pada hakikatnya pendidikan adalah upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup generasi penerusnya, selaku warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara, secara berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasionalnya. Pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal atau mendunia yang digambarkan sebagai kehidupan yang penuh dengan paradoksal dan ketakterdugaan. Kemampuan warga negara, suatu negara untuk hidup berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi perkembangan, perubahan masa depannya, sangat memerlukan pembekalan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni (ipteks) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan atau nilai religius dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai panduan atau petunjuk kehidupan bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara⁷.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat dikatakan bahwa kebudayaan daerah merupakan kerangka dasar yang saling berintegrasi menuju ke kesatuan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional. Dengan demikian perkembangan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional tidak akan terlepas dari perkembangan kebudayaan daerah. Integrasi kebudayaan merupakan kerangka dasar untuk mewujudkan integrasi bangsa atau integrasi nasional yang kukuh dan tangguh. Integrasi nasional yang dimaksud adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut, masyarakat Sulawesi Tenggara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mempunyai petunjuk yang jelas dalam nilai-nilai falsafah dari tiga etnis besar yaitu Buton, Muna dan Tolaki. Masyarakat Sultra yang berbeda suku, harus mengamalkan nilai-nilai falsafah yang terkandung dalam sila-silanya, merupakan sekumpulan kesatuan nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Adapun falsafah yang dimaksud yaitu:

a. **Pobinci-binciki Kuli (Buton)**

Buton terdiri atas pelbagai suku bangsa atau kelompok etnis yang bertempat tinggal di pelbagai wilayah mulai dari daratan sampai kepulauan, dari Kabaena sampai pulau Wakatobi. Pelbagai suku

⁷ Noor Ms Bakry. *ibid.* Hal.14

bangsa ini di satukan atau dimanunggalakan dengan sesanti “*poromu yinda saangu, pogaa yinda koolota*” artinya (dekat tidak bersentuhan, jauh tidak berantara) yaitu meskipun bangsa dan negara Buton terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Buton namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan yaitu bangsa dan negara Buton. Selain disatukan dengan sesanti tersebut di atas, Buton juga memiliki nilai-nilai falsafah yang menjadi pemersatu dalam bangsa Buton yaitu falsafah *pobinci-binciki kuli*. Nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah *pobinci-binciki kuli* tersebut adalah Pomae-Maeka (saling Takut), Pomae-Maeyaka (Saling Malu), Poangka-Ngaktaka (saling menghargai), Pomaa-Maasiaka (saling Menyayangi). Keempat falsafah ini akan nampak bilamana nilai-nilai kemanusiaan pada falsafah "Pobinci-Binciki Kuli" telah teraktualisasi setiap insan di bumi nusantara ini bahkan di dunia internasional. setiap manusia yang hadir di muka bumi ini tak lagi cemas akan masa depannya, mereka sudah mendapatkan kehidupan yang layak, aman dan damai

Pomae-maeka, Hal ini mengandung makna bahwa seluruh anggota masyarakat harus merasa saling takut satu terhadap yang lain dan semua harus mentaati ketentuan itu tanpa kecuali maka yang muda merasa takut kepada yang tua, demikian pula sebaliknya yang tua harus pula merasa takut kepada yang muda. Yang lemah merasa takut kepada yang kuat, sebaliknya si kuat harus merasa takut pula pada si lemah. Demikianlah seterusnya berlaku antara si kaya dan si miskin, si pandai dan si bodoh, antara pria dan wanita bahkan antara pemerintah dan rakyatnya. Disini tentunya akan timbul pertanyaan, apakah yang saling ditakuti itu? Jawabannya ialah bahwa setiap orang diakui mempunyai hak-hak asasi, harga diri, kehormatan, perasaan, harta benda, keluarga dan lain-lain yang wajib dipelihara, dipertahankan dan dilindungi bersama, sehingga benar-benar dirasakan aman dan damai. Untuk itu setiap anggota masyarakat wajib merasa takut untuk berbuat sesuatu yang berakibat merugikan orang lain. Setiap orang wajib merasa takut melanggar hak-hak asasi, perasaan, kehormatan dan benda pihak lain. Rasa takut demikianlah yang berlaku secara timbal balik antara seluruh anggota masyarakat seperti yang disebutkan di atas. Tetapi bagaimanakah jadinya seandainya suatu saat rasa takut ini sudah hilang, tidak diindahkan lagi oleh salah satu pihak dari masyarakat? hal itu berarti rasa takut sudah berganti dengan rasa berani. Akibatnya orang akan berani berbuat

sesuatu yang merugikan orang lain. Sudah tentu pihak lain yang dirugikan itu akan hilang pula rasa takutnya dan sebaliknya tentu akan timbul pula rasa beraninya untuk mempertahankan hak-hak asasinya, kehormatannya, harta bendanya, keluarganya dan sebagainya. Apabila hal itu sudah terjadi, maka ketentraman akan terganggu. Maka akan terjadilah kekacauan dalam masyarakat dengan segala akibatnya.

Pomaa-maasiaka, mengandung pula makna luhur bahwa antara anggota masyarakat harus sayang menyangi dan kasih mengasihi secara timbal balik, saling menyangi antara tua dan muda, antara sikaya dan simiskin, si kuat dan silemah, pemerintah dan rakyatnya, dan sebagainya. Alangkah harmonis dan bahagiannya suatu masyarakat yang mampu mengamalkan sila ini. Disana terwujud suatu masyarakat yang hidup bersama, tolong-menolong bergotong royong dalam segala urusan mereka.

Hal ini dipertegas oleh sabda nabi Muhammad S.A.W :

“Tidak ber-IMAN seseorang diantara kamu hingga (sebelum) ia MENCINTAI saudaranya sebagaimana ia MENCINTAI dirinya sendiri”. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).

“diumpamakan seorang mu'min itu dalam BERKASIH-KASIHAN dan BERSAYANG-SAYANGAN seumpama tubuh, apabila menderita sakit suatu anggota darinya, niscaya membawa kepada sakit lainnya dengan demam dan tidak mau tidur semalaman”. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).

Tetapi bagaimanakah jika falsafah ini dilanggar ? Hal itu akan timbul sifat sebaliknya, yaitu munculnya sifat-sifat benci, iri hati, dengki antara anggota masyarakat. Dan dapatlah dibayangkan apa yang akan terjadi bila dalam masyarakat sudah merajalela sifat-sifat buruk itu.

Popia-piara, mengandung makna positif bahwa antara anggota masyarakat berkewajiban saling memelihara, saling membina, melindungi mengamankan material, moril atau kedudukan dalam masyarakat. Memelihara agar apa yang dimiliki seseorang tidak terganggu, membantu supaya lebih berkembang dan meningkat lebih maju. Apabila falsafah ini dilanggar maka akan terjadi sifat-sifat sebaliknya yaitu saling jatuh-menjatuhkan, hancur-menghancurkan dalam masyarakat, hal mana akan membawa kerusakan dalam masyarakat.

Poangka-angkataka, mengandung pengertian tersendiri, yaitu bahwa setiap anggota masyarakat yang sudah memberikan darma baktinya kepada masyarakat dan bangsa, wajib diberikan

penghargaan yang setimpal, yang dapat mengangkat derajat dan martabatnya dimata masyarakat. darma bakti itu berupa memenangkan suatu perang, menyerahkan dengan ikhlas harta bendanya bagi kepentingan umum, memiliki suatu ilmu atau keterampilan yang berguna bagi kepentingan umum dan lain-lain. Kepada mereka itu diberikan balas jasa, penghargaan atau kehormatan tertentu seperti diberikan sebidang tanah untuk dimiliki turun-temurun, atau diberikan suatu pangkat tertentu. Hal itu dimaksudkan agar setiap anggota masyarakat mempunyai kesediaan berkorban dan berjihad untuk kepentingan umum. Tetapi apabila sila ini tidak diamalkan lagi maka akibatnya orangpun akan apatis bersikap masa bodoh terhadap kepentingan atau keselamatan negara dan bangsa karena pengorbanannya tidak dihargai. Ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang, semangat patriotisme dan heroisme akan hilang, yang berakibat Negara menjadi lemah.⁸

b. Falsafah Muna

Falsafah orang tua Muna zaman dulu begitu indah. *Dapoangka-angkatau, dapopia-piara, dapomasi-masigho, dapoadha-adhati*. Pesan ini mengajarkan pada kita semua orang Muna: untuk saling mengikuti dan bersama-sama dalam kebaikan, saling tenggang rasa/ menghargai, saling menyayangi dan bersifat sopan santun/ punya adat atau etika. Siapa pun kita, tidak memandang jabatan, suku, agama, strata sosial: *Kaumu* (kaum bangsawan/turunan raja/yang berhak menjadi raja), *Walaka* (golongan kedua setelah kaum bangsawan dalam strata sosial bangsa Muna/berhak atas pemerintahan/ *sara*) atau *Anangkolaki* (golongan masyarakat biasa) selayaknya mengimplementasikan nilai-nilai peninggalan orang tua Muna ini. Tapi sayang, hampir semua anak-anak muda termasuk orang tua Muna masa kini melupakan falsafah hidup itu. Hingga akhirnya konflik kekerasan terus bermunculan dari generasi ke generasi berikutnya.⁹

Selain falsafah di atas bangsa Muna juga mengenal falsafah yang di jadikan acuan kehidupan pada masa kesultanan Lakilaponto. Adapun falsafah yang dimaksud sebagai berikut:

Hansuru-hansuru agama, sumano konohansuru adhati

⁸ Moersidi. ibid Hal. 5 dalam Mahrudin. 2014. *Kontribusi Falsafah Pobinci-Binciki Kuli Masyarakat islam Buton Bagi dakwah islam untuk membangun Karakter Generasi muda Indonesia*. Yogyakarta: Jurnal Dakwah UIN Yogyakarta Volume XV nomor 2 Tahun 2014. Hal 345-346.

⁹ <http://rabiali.blogspot.com/2012/12/menggugat-konflik-sosial-orang-muna.html> di akses tanggal 9-7-2015

(hancur-hancurlah agama, asalkan adat istiadat tidak hancur)

Hansuru-hansuru adhati, sumano konohansuru liwu

(hancur-hancurlah adat istiadat, asalkan kampung tidak hancur)

Hansuru-hansuru liwu, sumano konohansuru mbhadha.

(hancur-hancurlah kampung, asalkan badan tidak hancur)

Falsafah di atas mempunyai makna yang sangat dalam yang artinya “Janganlah badan yang utama adalah Tanah”. Tanah disini memberikan makna daerah atau negeri tempat kita bermukim. Janganlah badan, memberikan makna bahwa janganlah mementingkan kepentingan pribadi. Tak jarang dalam mengarungi kehidupan kita di dunia, kita sering kali dibenturan dengan persoalan negeri dan persoalan kebutuhan diri kita. Saat kita dihadapkan dengan dua persoalan tersebut dalam waktu yang bersamaan, maka secara otomatis kita akan lebih memilih untuk mementingkan kepentingan pribadi kita. Dengan demikian, persoalan tentang negeri kita belakangkan.

Tindakan tersebut bukanlah tindakan yang salah. Akan tetapi, jika kita kaji secara mendalam, maka tindakan tersebut masuk dalam kategori tindakan yang keliru. Maraknya kasus korupsi dewasa ini yang menggerogoti Indonesia tidak lain merupakan bentuk representatif dari tindakan mengutamakan kepentingan pribadi. Saat mereka yang memiliki jabatan akan melakukan korupsi, mereka sesungguhnya tengah dihadapkan dengan dua hal tadi. Jika mereka memutuskan untuk melakukan korupsi, maka mereka tergolong orang-orang yang lebih mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan negara.

“Koemo Badha Sumanomo Liwu”, makna dari falsafah ini perlahan tapi pasti mulai menghilang. Tidak hanya dilingkungan masyarakat Indonesia, tapi juga di daerah asalnya. Sudah saatnya falsafah hidup yang sarat akan makna ini kita hidupkan kembali. Mulai mengutamakan kepentingan bangsa dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Karena apabila kita telah mengutamakan kepentingan bangsa, maka sama halnya kita mementingkan kepentingan orang banyak yakni rakyat dari bangsa ini.¹⁰

c. Falsafah Kalosara (Tolaki)

Kalosara adalah lambang pemersatu dan perdamaian yang sangat sakral dalam kehidupan Suku Tolaki. Secara fisik, Kalosara ini

¹⁰http://www.kompasiana.com/mhank/falsafah-hidup-yang-terlupakan_552e36616ea8349a228b4567 diakses tanggal 9-7-2015

diwujudkan dengan seutas rotan berbentuk lingkaran yang kedua ujungnya disimpul lalu diletakkan di atas selembar anyaman kain berbentuk bujur sangkar. Tradisi yang tetap lestari ini biasa digelar dalam menyelesaikan suatu pertikaian atau perselisihan dalam kehidupan masyarakat Suku Tolaki yang saat ini tersebar di Wilayah Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari. Kalo atau Kalosara adalah sebuah benda yang berbentuk lingkaran yang terbuat dari tiga utas rotan yang kemudian dililit ke arah kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Ujung lilitannya kemudian disimpul atau diikat, dimana dua ujung dari rotan tersebut tersembunyi dalam simpulnya, sedangkan ujung rotan yang satunya dibiarkan mencuat keluar.

Tiga ujung rotan, dimana yang dua tersembunyi dalam simpul dan ujung yang satunya dibiarkan mencuat keluar memiliki makna bahwa jika dalam menjalankan adat terdapat berbagai kekurangan, maka kekurangan itu tidak boleh diberberkan kepada umum atau orang banyak, sehingga pada Orang Tolaki terdapat kata-kata bijak: kenota kaduki osara mokonggadui, toono meohai mokonggoai, pamarenda mokombono'i. Arti dari kata-kata bijak tersebut adalah bila dalam menjalankan sesuatu adat terdapat kekurangan, maka adat, para kerabat, dan pemerintahlah yang akan mencukupkan semua itu atau dapat pula dimaknai kekurangan apapun yang terjadi dalam suatu proses adat, maka hal itu harus dapat diterima sebagai bagian dari adat Orang Tolaki.¹¹

Potensi inovatif dari budaya Suku Tolaki saat ini, harus dipandang sebagai suatu potensi dan peluang, bukan tantangan dan hambatan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat. Secara filosofi Suku Tolaki telah menetapkan kerangka budayanya dalam bentuk falsafah hidup, yang merupakan penjabaran dari budaya *kalosara*, diungkapkan sebagai berikut:

Medulu mbenao = satu dalam jiwa

Medulu mbonaa = satu dalam pendirian

Medulu mboehe = satu dalam kehendak/cita-cita.

Ketiga ungkapan tersebut dapat diaplikasikan dalam bentuk:

1. Satu dalam jiwa, diaplikasikan dalam bentuk:

Mombe kamei meiri ako = saling cinta-mencintai;

Mombeka pia-piarako = salingelihara-memelihara

¹¹ Anonim. <http://tolaki-konawe-mekongga.blogspot.com/2013/10/makna-kalosara.html> di akses tgl, 9-7-2015

2. Satu dalam pendirian, diaplikasikan dalam bentuk:
Mombekapona-pona ako = saling menghargai pendapat;
Mombeka peha-pehawako = saling ingat-mengingat;
Mombeka pei-peiranga ako = saling saran-menyarankan.
3. Satu dalam kehendak/cita-cita, diaplikasikan dalam bentuk:
Mombeka sudo-sudo ako = saling tolong-menolong;
Mombeka tulu-tulungi ako = saling tolong-menolong;
Mombeka tamai ako = saling memberi dan menerima;
Mombeka alo-alo ako = saling ambil-mengambil satu tenaga;
Mombekakai-kai ako = saling menikmati makanan;
Mombeka powe-powehi ako = saling memberi dan menerima
(Tarimana, 1993).

Bahasa filosofi tersebut mencerminkan keluhuran budaya Suku Tolaki. Potensi tersebut memiliki nuansa inovatif yang dapat berfungsi sebagai landasan kemajuan budaya dan menjadi daya dorong utama peningkatan kreativitas masyarakat Sultra, khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan damai. Bagi Masyarakat Tolaki, *kalo* merupakan suatu pedoman yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. *Kalo* pada tingkat nilai budaya merupakan sistem norma adat yang berfungsi mewujudkan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. *Kalo* pada tingkat aturan khusus mengatur aktivitas-aktivitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkungannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam konsep *kalo* yang mengatur aktivitas tersebut dikenal *meraou*, yaitu aturan khusus yang mengatur setiap individu dalam berbahasa yang menunjukkan sopan santun (bertata krama); *Atora*, yakni aturan khusus dalam komunikasi sosial.

Supaya setiap individu dapat terhindari dari pelanggaran yang menyebabkan hadirnya *kalo*, maka dikembangkanlah kata-kata falsafah yang dapat memberi sugesti kepada anggota masyarakat untuk bertingkah laku dengan baik. Misalnya: *Inae kosara iee nggopinesara*, *Inae lia sara iee nggopinekasara*. Artinya: Siapa yang tahu adat, ia yang akan dihargai dan dihormati dan sebaliknya siapa yang melanggar adat akan dikasari (dihukum). Ungkapan ini mempunyai makna yang sangat dalam bagi kehidupan masyarakat. Tiap orang diharapkan untuk hidup dan bertingkah laku sesuai dengan norma adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. Seseorang akan mendapat penilaian yang baik dari masyarakat, apabila sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sebaliknya seseorang akan mendapat penilaian

yang negatif atau kurang baik, bila yang bersangkutan sering melakukan perbuatan tercelah yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku (Mazi, 2004).

Nilai-nilai historis seperti tersebut, masih saja terpatery dalam sanubari individu-individu masyarakat Sulawesi Tenggara, sehingga menempatkan dirinya sebagai salah seorang agen pertahanan keamanan daerahnya. Dengan demikian secara tidak langsung melaksanakan tugas pengamanan teritorial wilayah Sulawesi Tenggara dan Indonesia umumnya, ini dimungkinkan karena dinamika masyarakat Sulawesi Tenggara yang begitu tinggi, diantaranya profesi sebagai pelayar niaga, memegang posisi penting dalam mengamankan perairan di mana dia berada. Kondisi inilah yang sangat menunjang stabilitas dan keamanan teritorial Sulawesi Tenggara khususnya dan Indonesia umumnya. Tradisi lokal seperti ini sangat diharapkan ditumbuhkembangkan dalam era sekarang ini untuk membantu tugas aparat pertahanan dan keamanan, sekaligus menunjang pembangunan daerah yang salah satu bagiannya adalah pembangunan pertahanan dan keamanan wilayah, khususnya dalam mewujudkan cita-cita masyarakat sejahtera di era Sultra Raya 2020. Falsafah orang Tolaki, Muna dan Buton seperti disebutkan di atas telah tumbuh dan berkembang sejak masa kerajaan-kerajaan tradisional. falsafah hidup tersebut mengandung nilai persatuan dan berwawasan Nusantara.¹²

Jika seluruh komponen bangsa Indonesia mengamalkan dengan benar nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah ini untuk dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, dapat dikatakan bahwa tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula, apabila semua warga Indonesia dan khususnya para pemegang kebijakan yang diposisikan sebagai panutan bangsa ini menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah ini, bisa jadi bangsa ini akan terhindar dari berbagai permasalahan, misalnya perpecahan atau disintegrasi, dan tentu bangsa ini akan menjadi bangsa yang berwibawa dan mandiri. Melihat fenomena sekarang ini, mestinya perlu dipertanyakan betulkah rasa dan nilai nasionalisme sudah benar-benar diamalkan dalam bentuk perbuatan dan tidak hanya dikatakan dalam lisan.

¹² <http://anwarhapid.blogspot.com/2013/01/kalosara-sebagai-instrumen-utama-dalam.html>

Nilai-nilai luhur dari ketiga falsafah di atas dapat di yakini kebenarannya sebagai pandangan hidup masyarakat Sulawesi Tenggara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur falsafah tersebut sebagai nilai-nilai dasar dalam kehidupan bermasyarakat akan menjadi panduan atau petunjuk hidup bersama untuk mencapai cita-cita bangsa dalam bernegara.

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, bersikap dan berperilaku cinta tanah air, bersendikan kebudayaan bangsa, geopolitik dan geostrategi, kepada mahasiswa calon ilmuwan warga Indonesia yang mengkaji dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, yang dijiwai dan berlandaskan idiologi pancasila. Kualitas warga negara akan ditentukan terutama oleh keyakinan dan sikap hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara di samping derajat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan analisa terhadap hubungan dinamis yang terjadi antara pendidikan multikultural dengan falsafah tiga etnis dalam masyarakat Sultra, dapat disimpulkan bahwa ketiga falsafah telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menciptakan kemajemukan di Sulawesi Tenggara. Hal ini bisa dilihat dari hubungan ketiga etnis masyarakat Sulawesi Tenggara yaitu Buton, Muna dan Tolaki satu sama lain sangat erat hubungannya sebagaimana terlihat dari kata-kata falsafah dari masing-masing etnis tersebut. Buton yaitu *Pomae-Maeka* (saling Takut), *popia-piara* (Saling Memelihara), *Poangka-angkataka* (saling menghargai), Pomaa-Maasiaka (saling Menyayangi) Muna yaitu *Dapoangka-angkatau*, *dapopia-piara*, *dapomasi-masigho*, *dapoadha-adhati* dan Falsafah Tolaki yaitu *Medulu mbenao* (satu dalam jiwa), *Medulu mbonaa* (satu dalam pendirian), *Medulu mboehe* (satu dalam kehendak/cita-cita). Penerapan ketiga falsafah ini dalam kehidupan bermasyarakat dapat mempengaruhi perilaku generasi muda untuk tidak melakukan tindak kekerasan, merampas hak orang lain, penggunaan obat-obat terlarang, dan terorisme dan lebih pentingnya lagi tetap terjaganya kehidupan multikultural di Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muh. *Naskah Keagamaan dan Relevansinya dengan proses islamisasi Buton Abad ke-14 hingga 16*. Naskah Dunia. Penerbit Respect. Bau-Bau. 2009.
- Anoegrajekti, Novi. 2014. *Dinamika Budaya Indonesia Dalam pusanan Pasar Global*. Yogyakarta: Ombak
- Anonim. <http://tolaki-konawe-mekongga.blogspot.com/2013/10/makna-kalo-sara.html> di akses tgl, 9-7-2015
- Aprilliana Setyowati, 2005. *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: FIP UNY.
- Amirullah Syarbini. *Islam dan Kearifan Lokal*. Makalah yang dipresentasikan pada The 11TH Annual conference On Islamic Studies. Bangka Belitung, 10-13 Oktober 2011.
- Alifuddin, Muhammad. 2007. *Islam Buton (Interaksi Islam dengan Budaya Lokal*. Disertasi pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bakry, Ms Noor. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Endah Setyorini, 2005. *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: FIP UNY.
- Heidi Shri Ahimsa Putra, *Strukturalisme Levy Strauss, Mitos Dan Karya Sastra* Yogyakarta : Bentang Budaya, 1999.
- <http://anwarhapid.blogspot.com/2013/01/kalosara-sebagai-instrumen-utama-dalam.html>
- <http://rabiali.blogspot.com/2012/12/menggugat-konflik-sosial-orang-muna.html> di akses tanggal 9-7-2015
- http://www.kompasiana.com/mhank/falsafah-hidup-yang-terlupakan_552e36616ea8349a228b4567 diakses tanggal 9-7-2015
- Kaelan, M.S., 2003. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian Pendidikan Nasional badan penelitian dan pengembangan kurikulum. 2010. *Pengembangan pendidikan Budaya dan Karakter bangsa*. Jakarta.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Antropologi dalam Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, 1958
- _____ *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta : Dian Rakyat, 1974
- _____ *Sejarah Teori Antropologi I & II*, Jakarta : UI Press, 1990
- _____ *Masalah Suku Bangsa dan Integrasi Nasional*, Jakarta : UIP, 1983

- _____. Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta : Rineka Cipta, 1993
- Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta : Bentang Budaya, 1995
- _____. Metodologi Sejarah, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1995
- La Ode Rusman Bahar, *Tradisi Haroa yang Lestari*, http://timurangin.blogspot.com/2009/08/tradisi_haroa_yang_lestari.html, diunduh pada tanggal 29 September 2012, sesuai pula dengan Wawancara Om Kandang, Tokoh Agama (Sara hukum) pada masyarakat islam Buton yang ada di Kendari Sulawesi Tenggara.
- Munir, A. dan Sudarsono. 2001. *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Moersidi. 1990. *Mengungkap Nilai-Nilai Kepemimpinan Buton Sebelum dan Sesudah Datangnya Agama Islam*. Makalah Pada Kerukunan Mahasiswa Indonesia Buton.
- Pawluch, Doronthy, William Shaffir, and Charlene Miall. 2005. *Doing Ethnography: Studying Everyday Life*. Toronto: Canadian Scholars' Press
- Putra, Papara Maia. 2000. *Membangun dan Menghidupkan Kembali Falsafah Islam Hakii dalam Lembaga kitabullah*. Makassar. Yayasan AUA Menyingsing Pagi.
- Rahmat, Subagya. *Agama Asli Orang Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan, 1981.
- Said, D. 1984. *Pengaruh Perkembangan Islam Terhadap Masyarakat Buton dari Abad 16 sampai Abad 20*. Skripsi, IKIP Ujung Pandang.
- _____. 2005. Transformasi Nilai-nilai Pemerintahan Kesultanan Butun: Suatu Telaah Sejarah. *Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara IX*. Bau-Bau 5-8 Ogos 2005.
- Shaleh, Rahman, Abdul. 2005. *Pendidikan Agama dan Pebangunan watak bangsa*. Jakarta : Pt. RajaGrafindo persada
- Setyo Nugroho. 2002. "Mengimplementasikan Pendidikan Multikultural di Sekolah" Jurnal Ilmiah Guru "COPE" No. 02/Tahun VI/Desember 2002
- Shoorl, Pim. 2003. *Masyarakat, Sejarah, dan Budaya Buton*. Jakarta: Djembatan-KITLV.
- Sumarjo, Joko. *Arkeologi Budaya Indonesia : Pelacakan Hermeneutis-Historis terhadap Artefak-Artefak Kebudayaan Indonesia*, Yogyakarta : Qalam, 2002.

- Suhady, Idup & AM. Sinaga. 2003. *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan RI*. LAN Jakarta.
- Sujarwa. 2010. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suparlan, Parsuadi. “ Kata Pengantar” dalam Ronald Robertson (ed.) *Sociology of Religion*. terj. Ahmad Fedyani, *Agama dalam Analisa dan Intrepretasi Sosiologi*, Jakarta : Rajawali Press, 1988
- _____ “Kebudayaan dan Pembangunan”, dalam, *Media IKA*, No. 11, Th. XIV.
- _____ “Pengantar Metode Penelitian Kualitatif”, dalam, *Media*, edisi 14, tahun III/ maret, 1993.
- Udu, Hamirudin. *Pandangan Multikulturalisme Dalam Tradisi Lisan Kangkilo Masyarakat Buton*. Makalah disampaikan dalam seminar internasional multicultural dan Globalisasi 2012.
- Udu,Sumiman. 2009. *Naskah Buton, Naskah Dunia*. Prosiding Simposium Internasional IX Pernikahan Nusantara Di Kota Bau-Bau. Respect.
- Zahari, Mulku. 1980. *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butani (Buton I)*. Jakarta: Dirjen Kebudayaan Dinas Republik Indonesia.
- Zuhdi, Susanto. 1999. *Labu Rope Labu Wana: Sejarrah Bton Abad XVII-XVIII*. Jakarta: Disertasi Fakultas Sastera, Universitas Indonesia.